

PELAYANAN KESEHATAN YANG TERARAH, TERUKUR, TEREVALUASI DAN INOVASI BERLANDASKAN *GOOD GOVERNANCE* DI KABUPATEN LOMBOK BARAT

Oleh:

M. Karjono¹ ; Silvia Ni Nyoman Sintari²

1. Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Pendidikan Mandalika
2. STIKES Wira Medika Bali

Abstrak : Birokrasi pemerintahan adalah suatu organisasi pemerintahan yang terdiri dari sub-sub struktur yang memiliki hubungan satu sama lain. Salah satu misi pembangunan bidang kesehatan yaitu meningkatkan dan memantapkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya serta berdaya saing. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk membarikan gambaran gagasan dalam menjalankan pemerintahan bidang kesehatan dilakukan dengan terarah, terukur, terevaluasi dan inovasi berlandaskan *good governace* di Kabupaten Lombok Barat. Hasil kajian dari berbagai literature yang tertuang dalam bentuk gagasan pemikiran maka terarah berarti seorang kepala dinas kesehatan harus memahami, menyikapi dan mampu mengimplementasikan sesuai dengan misi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Terukur memiliki makna seorang kepala dinas kesehatan, harus mampu berkerja dengan perhitungan target dengan tujuan supaya sesuai dengan yang ingin dicapai. Terevaluasi artinya kepala dinas harus mampu melakukan evaluasi terhadap jajarannya, baik evaluasi Sumber Daya Manusia, kinerja dan program yang dilaksanakan dimasing-masing bidang dan inovasi diartikan sebagai suatu pembaharuan terhadap berbagai sumber daya sehingga sumber daya tersebut mempunyai manfaat yang lebih bagi pelayanan disesuaikan dengan hasil evaluasi sebelumnya berlandaskan *good governace* yaitu transparan, partisipasi, akuntabilitas dan koordinasi. Berdasarkan gagasan tersebut maka dapat disarankan dalam menjalankan pemerintahan khususnya bidang kesehatan sebaiknya dilakukan terarah, terukur, terevaluasi dan inovasi berlandaskan *good governance*.

Kata Kunci : Terarah, terukur, terevaluasi, inovasi dan *good governance*.

PENDAHULUAN

Meningkatkan dan memantapkan Sumber Daya Manusia yang sehat membutuhkan upaya kerja nyata dalam membangun manusia yang sehat sehingga menghasilkan manusia yang cerdas sehingga mampu menjadi manusia yang berdaya (memiliki nilai juang) dan mampu berkompetensi secara lokal, nasional bahkan internasional.

Sumber Daya Manusia merupakan faktor yang penting dan menentukan dalam setiap organisasi. Sebaik apapun sistem yang telah disusun atau dilengkapi dan apapun sarana dan prasarana yang tersedia dalam organisasi, tanpa didukung oleh keberadaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan yang memadai tentu tidak akan berarti banyak bagi keberadaan organisasi. Oleh karena itu, suatu organisasi harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi.

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan suatu negara. Hal ini karena manusia sebagai subjek dan objek dalam pembangunan. Oleh karena itu, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional.

Di samping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menghasilkan ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional.

Pembangunan menjadi suatu mata rantai dan bagian integral dari reformasi menyeluruh yang sedang berlangsung dewasa ini (Suradinata, 2008). Prinsip ini mensyaratkan performa birokrasi yang maksimal didalam menjalankan pelayanan publik, sekaligus mekanisme *check and balances* yang dinamis dan konstruktif dari badan legislatif. Birokrasi yang berkualitas akan dapat mengimbangi mitra-mitra pembangunan tersebut dalam mendorong peningkatan dan inovasi-inovasi pembangunan yang dibutuhkan oleh daerah.

Birokrasi pemerintah yang berkualitas merupakan garis terdepan yang berhubungan dengan pemberian pelayanan umum kepada masyarakat. Oleh karena itu birokrasi pemerintah harus bersikap netral baik dari sisi politik yaitu merupakan kekuasaan politik maupun dari sisi administratif. Sebab apabila birokrasi menjadi kekuatan politik maka akan menjadi tidak netral, yaitu memihak kepada kekuatan/aliran politik tertentu (Rohayatin, 2021)

Rika Ramadhanti dalam Jurnal Trias Politika, Vol 2. No.1 : 96 – 104 dengan judul Politik dan birokrasi pemerintahan menyebutkan bahwa dalam memberikan pelayanan umum, birokrasi pemerintah dituntut lebih efektif dan efisien, sehingga akan tampak mementingkan kualitas pelayanan (*service quality*).

Rentang birokrasi yang terlampau panjang dan berbelit-belit yang bersumber dari kalangan birokrat akan menghambat kinerja birokrasi. Birokrasi merupakan struktur organisasi di sektor pemerintahan yang memiliki ruang lingkup tugas sangat luas serta memerlukan organisasi besar dengan sumber daya manusia (SDM) yang besar pula jumlahnya. Sumber daya manusia yang berdedikasi dan memiliki loyalitas tinggi terhadap pekerjaan dapat diperoleh apabila pihak manajemen menciptakan kondisi kerja yang dapat meningkatkan kinerja bagi pegawainya.

Grand desain reformasi birokrasi yang telah dicanangkan harapannya agar birokrasi lebih dapat memahami akan tugas pokok dan fungsinya sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat. Pada dasarnya Refomasi Birokrasi adalah suatu perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi seperti kelembagaan, sumber daya manusia, ketatalaksanaan, akuntabilitas, aparatur, pengawasan dan pelayanan publik, yang dilakukan untuk melaksanakan peran dan fungsi birokrasi secara tepat, cepat dan konsisten, guna menghasilkan manfaat sesuai diamanatkan konstitusi.

Melalui Kementerian PAN-RB telah mengembangkan nilai-nilai dasar yang mendasari kualitas sumber daya aparatur sipil Negara yaitu : 1) Integritas, mengutamakan perilaku terpuji, disiplin dan penuh pengabdian; 2) Profesional, menyelesaikan tugas dengan baik, tuntas, sesuai kompetensi (keahlian); dan 3) Akuntabel, mempertanggungjawabkan tugas dengan baik, dari segi proses maupun hasil.

Nilai-nilai dimaksud merupakan tujuan reformasi birokrasi dan diharapkan mampu mengatasi berbagai persoalan akuntabilitas baik di pusat maupun di daerah di Indonesia termasuk di Kabupaten Lombok Barat yang menjadi perhatian khusus karena memiliki kawasan pariwisata terbanyak dibandingkan dengan kabupaten lain.

Terkait dengan pelayanan di fasilitas kesehatan menjadi perhatian khusus dinas kesehatan kabupaten mulai dari tingkat pustu, polindes, puskesmas sampai pada tingkat layanan rujukan termasuk RSUD Tripat dan Awet Muda Narmada. Komunikasi dan kerjasama antar instansi harus diperkuat sehingga keterbukaan terhadap pelayanan public menjadi lebih baik dan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.

Kabupaten Lombok Barat terdiri dari 10 kecamatan dengan 122 desa/kelurahan, memiliki

fasilitas kesehatan 7 puskesmas rawat inap, 13 puskesmas non rawat inap, 20 puskesmas keliling dan 62 pustu dengan 2 rumah sakit, yang melayani 721.481 penduduk (Dinkes Lobar, 2021). Saat ini Kabupaten Lombok Barat memerlukan Kepala Dinas Kesehatan yang cakap dalam membangun jejaring di tingkat nasional, mampu berinovasi dalam pengelolaan sumberdaya kesehatan, tanggap dalam upaya pencegahan penyakit secara epidemiologi dan cakap dalam mengawal pembangunan infrastruktur, serta dapat bergerak cepat dalam merespon kebutuhan pembangunan yang menunjang agenda nasional dan internasional sebagai salah satu bentuk pelayan publik yang prima.

Bertitik tolak dari hal di atas, Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat dan menurut Undang- Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Oleh karena itu, ketersediaan pelayanan kesehatan yang merata, bermutu dan berorientasi kepada kepuasan pasien merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh Dinas Kesehatan yang membawahi Puskesmas. Hal ini berarti bahwa Puskesmas dituntut untuk memiliki kinerja yang baik dalam melayani kesehatan dasar masyarakat. Untuk memenuhi tuntutan tersebut tentu saja puskesmas harus didukung oleh dana, sumber daya manusia yang bermutu dan professional serta peralatan yang memadai baik kuantitas maupun kualitas.

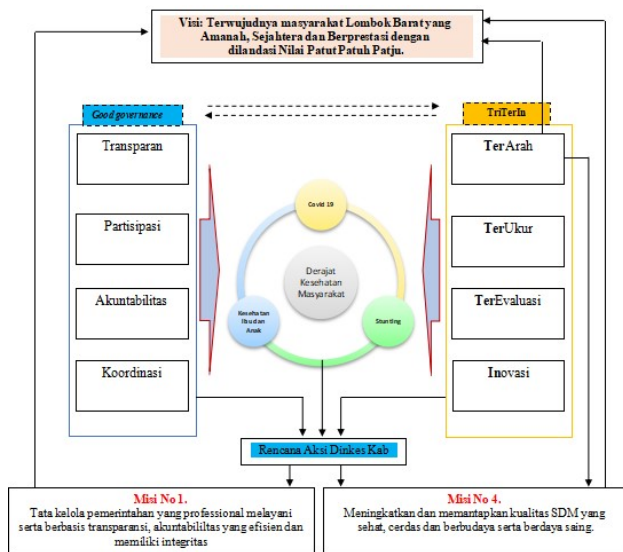
Kepala Dinas Kesehatan sebagai pimpinan tinggi pratama memiliki kedudukan yang sangat vital karena memiliki tugas pokok membantu bupati dan wakil bupati dalam memimpin, merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan kegiatan Dinas Kesehatan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dalam bidang kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat.

Memastikan upaya pencapaian pelaksanaan fungsi tersebut, kepala dinas kesehatan perlu memiliki konsep perencanaan yang baik. Sebagai ASN yang lama bekerja di bidang kesehatan, dengan melihat latar belakang di atas serta fakta di lapangan terkait permasalahan kualitas pelayanan saya tertarik untuk mengajukan diri menjadi calon Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat agar bisa ikut menentukan arah kebijakan sesuai dengan kebijakan umum yang sudah ditentukan oleh bupati dan wakil bupati Sasaran Strategis/Prioritas RPJMD 2019-2024 dengan tujuan yaitu meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat seutuhnya.

PEMBAHASAN

Kabupaten Lombok Barat merupakat salah satu kabupaten dengan menjujung tinggi nilai *Patuh, Patuh, Padju* dalam memerikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan strata sosial di dalamnya, maka dalam menjelankan pemerintahan perlu kosep yang matang dan dapat dilaksanakan.

Penjabaran kosep sangat penting dilakukan supaya dalam melaksanakan tugas sebagai kepala dinas kesehatan harus mampu mengimplementasikan stategi dan inovasi tersebut. Penjabaran konsep tersebut dapat disajikan pada bagan berikut ini:



Gambar 1. Konsep Implementasi TriTerIn dengan *Good Governace*

Berdasarkan Gambar di atas dapat dijelaskan bahwa sebagai pembantu bupati dan wakil bupati, Kepala Dinas Kesehatan harus mempunyai konsep keterpaduan antara terarah, terukur, terevaluasi dan inovasi berlandaskan *good governace*.

Konsep *TriTerIn* dimaknai sebagai akronim yang memiliki nilai-nilai Terarah, Terukur, Terevaluasi dan Inovasi. Makna dari masing-masing akronim tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Terarah

Memiliki makna bahwa seorang kepala dinas kesehatan harus memahami, menyikapi dan mampu mengimplementasikan misi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang ke empat yaitu “Meningkatkan dan memantapkan kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berbudaya serta berdaya saing”

Merujuk pada misi ke 4 tersebut secara tegas menyebutkan bahwa target yang ingin dicapai adalah Sumber Daya Manusia yang sehat. SDM yang sehat harus dimulai dari keluarga yang sehat, mulai dari ibu, bapak dan anak yang dilahirkan. Anak yang sehat menjadi cikal bakal generasi yang

berkualitas, generasi penerus pembangunan di Kabupaten Lobok Barat.

Anak yang dilahirkan sehat dari ibu yang sehat akan menghasilkan anak yang sehat dan cerdas, anak yang cerdas akan mampu mengimplementasikan nilai-nilai budaya yang luhur sehingga terbentuk generasi yang siap bersaing.

Jika dijabarkan secara terpadu maka penjabaran misi ke 4 dimulai dari hulu sampai ke hilir dengan melibatkan semua sector terkait dan selalu berpegang pada misi tersebut sehingga arahnya jelas dan berkesinambungan.

b. Terukur

Memiliki makna seorang kepala dinas kesehatan, harus mampu bekerja dengan perhitungan target dengan tujuan supaya tidak bias/sesuai dengan yang ingin dicapai.

Kemampuan Kepala Dinas Kesehatan dalam suatu organisasi birokrasi pemerintah daerah harus memiliki perilaku terukur (pengetahuan, sikap, keterampilan) sebagai modal dasar untuk meningkatkan kinerja organisasi. Kemampuan yang dimiliki setiap individu merupakan salah satu modal dasar bagi suatu organisasi untuk mencapai tujuannya yang menjadi inisiator untuk menggerakkan seluruh sumber daya kesehatan di Kabupaten Lombok Barat dalam menjalankan program yang telah direncanakan.

Kemampuan calon kepala dinas dalam menterjemahkan makna Terukur dalam setiap program atau kegiatan yang nantinya dilaksanakan harus memiliki nilai keterpaduan, bisa dicapai dan mampu untuk dilaksanakan. Setiap program yang direncanakan baik yang baru maupun rutinitas harus memiliki hitungan yang tepat, dan memiliki target hasil yang diharapkan sehingga mempermudah dalam melakukan evaluasi keberhasilan program tersebut.

Selama ini, masih ada program atau kegiatan yang dilaksanakan hanya sekedar saja tanpa membuat target yang diharapkan sehingga program tersebut selesai begitu saja tanpa melihat hasil yang di dapatkan (kerja rutinitas)

c. Terevaluasi

Menurut *American Public Health Association* (Azwar, 1996) evaluasi adalah suatu proses menentukan nilai atau besarnya sukses dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Seorang kepala dinas harus mampu melakukan evaluasi terhadap jajarannya, baik evaluasi Sumber Daya Manusia, kinerja dan program yang dilaksanakan di bidang masing-masing.

Proses ini mencakup langkah-langkah memformulasikan tujuan, mengidentifikasi kriteria secara tepat yang akan dipakai mengukur sukses, menentukan besarnya sukses dan rekomendasi untuk

kegiatan program selanjutnya.

Proses evaluasi yang dilakukan oleh calon kepala dinas dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang telah dicapai dengan rencana yang telah ditentukan. Evaluasi merupakan alat penting untuk membantu pengambilan keputusan sejak tingkat perumusan kebijakan maupun pada tingkat pelaksanaan program (Wijono, 1999).

Menurut Wijono (1999), evaluasi adalah prosedur secara menyeluruh yang dilakukan dengan menilai masukan, proses dan indikator keluaran untuk menentukan keberhasilan dari pelaksanaan suatu program dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

Berbicara tentang evaluasi sering juga dikaitkan dengan supervisi. Supervisi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan meliputi pemantauan, pembinaan dan pemecahan masalah serta tindak lanjut. Kegiatan ini sangat berguna untuk melihat bagaimana program atau kegiatan dilaksanakan sesuai dengan standar dalam rangka menjamin tercapainya tujuan program.

Supervisi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan meliputi pemantauan, pembinaan dan pemecahan masalah serta tindak lanjut. Kegiatan ini sangat berguna untuk melihat bagaimana program atau kegiatan dilaksanakan sesuai dengan standar dalam rangka menjamin tercapainya tujuan program. Tujuan diadakannya supervisi adalah untuk meningkatkan cakupan secara merata dan berkesinambungan serta kualitas pelaksanaan program imunisasi. Sasaran supervisi adalah seluruh petugas yang terlibat dengan program imunisasi disesuaikan dengan jenjang supervisi.

Saat ini sangat jarang dilakukan evaluasi keberhasilan sebuah program sehingga program tersebut menjadi kegiatan rutinitas yang tidak memiliki pangkal dan tujuan sehingga dalam melaksanakannya seringkali terjadi tumpang tindih dengan program yang lain, hal inilah yang menjadi tugas penting seorang calon kepala dinas untuk selalu melakukan evaluasi supaya dari hasil evaluasi tersebut akan menghasilkan inovasi perbaikan untuk program selanjutnya.

d. Innovation

Suatu proses dan atau hasil pengembangan pemanfaatan suatu produk/sumber daya yang telah ada sebelumnya sehingga memiliki nilai yang lebih berarti. Inovasi juga diartikan sebagai suatu pembaharuan terhadap berbagai sumber daya sehingga sumber daya tersebut mempunyai manfaat yang lebih bagi manusia disesuaikan dengan hasil evaluasi sebelumnya.

Melalui inovasi tersebut di atas ditujukan untuk melakukan penataan birokrasi bidang kesehatan

menuju pelayanan publik yang Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional melayani serta berbasis transparansi, akuntabilitas yang efisien dan memiliki integritas (misi ke 1 Pemerintah Kabupaten Lombok Barat) yang berlandaskan nilai-nilai *Patut, Patuh, Padju*.

Pengamalan nilai *Patut, Patuh, Padju* dalam pelayanan kesehatan yang prima dapat dijabarkan dalam nilai *Patut* : Baik, Terpuji, hal yang tidak berlebih-lebihan dalam menjalankan roda pemerintahan khususnya di Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat, *Patuh* : Rukun, damai, toleransi, menghargai dalam menerima pendapat orang lain termasuk masukan dan saran dari lintas sektoral serta *Padju* : Rajin, giat tak mengenal putus asa dalam memberikan pengabdian dan pelayanan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Lombok Barat.

e. Berlandaskan good governance

Calon Kepala Dinas Kesehatan yang memiliki strategi pemerintahan dengan menerapkan good governance serta inovasi TriTerIn harus memastikan setiap kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat dapat terealisasi dengan cepat dan efektif melalui kinerja birokrasi yang efektif dan efisien sesuai dengan visi bupati dan wakil bupati yakni: “Terwujudnya masyarakat Lombok Barat yang Amanah, Sejahtera dan Berprestasi dengan dilandasi Nilai Patut Patuh Patju.

Selain pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat, kepala dinas kesehatan juga harus mampu mengawal program-program unggulan yang merupakan program prioritas yang harus diterjemahkan sekaligus direalisasikan secara cepat oleh Dinas Kesehatan.

Penerapan pemerintahan yang berorientasi pada hasil maka konsep TriTerIn akan berjalan dengan baik apabila pelayanan kesehatan didasari dengan Transparan, partisipasi, akuntabilitas dan koordinasi. Transparan diartikan sebagai suatu bentuk pelayanan yang terbuka dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkeadilan untuk semua dan mengutamakan untuk membantu sesama makhluk sosial yang sedang membutuhkan penanganan gangguan kesehatan baik fisik maupun non fisik tanpa ada diskriminasi/membedakan. Partisipasi artinya dalam melaksanakan pelayanan peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam membangun kepercayaan dan kepedulian antar sesama sehingga pelayanan menjadi kebutuhan dan milik bersama. Akuntabilitas artinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus mampu memegang tanggung jawab dalam melaksanakan dan kepala dinas kesehatan juga harus mampu mempertanggungjawabkan terhadap apa yang menjadi kebijakan yang dikeluarkan untuk

kepentingan masyarakat banyak. Koordinasi artinya semua jenis program yang dikeluarkan oleh bidang terlebih dahulu dikoordinasikan dengan kepala dinas kesehatan dan bidang yang lain supaya dalam menjalankan program tidak terjadi tumpang tindih antara yang satu dengan yang lainnya.

Mengacu pada konsep TriTerIn berlandaskan good governance maka roda pemerintahan akan berjalan dengan baik didukung juga oleh tenaga-tenaga yang professional dan bertanggung jawab.

PENUTUP

a. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan pemerintahan khususnya dalam bidang kesehatan maka disarankan sebagai berikut :

1. Menjalankan pemerintahan khususnya bidang kesehatan harus terarah yaitu seorang kepala dinas kesehatan harus memahami, menyikapi dan mampu mengimplementasikan misi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat ke empat yaitu meningkatkan dan memantapkan kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berbudaya serta berdaya saing.
2. Menjalankan pemerintahan khususnya bidang kesehatan harus terukur memiliki makna seorang kepala dinas kesehatan, harus mampu berkerja dengan perhitungan target dengan tujuan supaya tidak bias/sesuai dengan yang ingin dicapai.
3. Menjalankan pemerintahan khususnya bidang kesehatan harus terevaluasi artinya kepala dinas harus mampu melakukan evaluasi terhadap jajarannya, baik evaluasi Sumber Daya Manusia, kinerja dan program yang dilaksanakan di bidang masing-masing
4. Menjalankan pemerintahan khususnya bidang kesehatan memiliki inovati artinya sebagai suatu pembaharuan terhadap berbagai sumber daya sehingga sumber daya tersebut mempunyai manfaat yang lebih bagi manusia disesuaikan dengan hasil evaluasi sebelumnya
5. Menjalankan pemerintahan harus berlandaskan *good governace* yaitu transparan, partisipasi, akuntabilitas dan koordinasi.

b. Saran

Mengacu pada simpulan tersebut maka rekomendasi yang bisa disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang prima dengan menerapkan konsep *TriTerIn* (Terarah; Terukur, Terevaluasi dan Inovasi).
2. Menjalankan konsep tersebut seorang kepala dinas kesehatan harus berkerja berlandaskan

dengan pelayanan pemerintahan yang *good governace* (Transparan, partisipasi, akuntabilitas dan koordinasi).

3. Meningkatkan strategi pelayanan dengan penguatan upaya promotif dan preventif di tingkat masyarakat
4. Meningkatkan kapasitas petugas untuk mendukung pelayanan kesehatan primer yang berkualitas
5. Meningkatkan inovasi pelayanan kesehatan melalui pemanfaatan teknologi digital dan kearifan lokal masyarakat melalui inovasi dalam pengelolaan sumber daya yang ada untuk pembangunan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan mampu bersaing secara nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, A. (1996). Pengantar Administrasi Kesehatan, Binarupa Aksara, Jakarta.
- Dinkes Lobar (2021) Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat: Gerung
- Lombok Barat (2022) <https://girimenangnews.com/kejar-target-penurunan-stunting-14-pada-tahun-2024-di-lobar-program-gardu-santun-harap-dihidupkan-kembali/> [Akses pada tanggal 25 Januari 2022; Jam 10:03 Wita].
- Lombok Barat (2022) <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1869/partisi-pasi-perempuan-politik-wujudkan-kesejahteraan-bangsa> [Akses pada tanggal 25 Januari 2022; Jam 10:17 Wita]
- Pemda Lobar (2019) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 – 2024: Lombok Barat
- Supriyanto, S. (1988). Evaluasi Bidang Kesehatan, Brata Jaya, Surabaya.
- Suradinata (2008). Kepemimpinan Daerah dan Nasional Membangun Daerah Menuju Indonesia Bangkit. PT. Elex Media Kompetindo:Jakarta
- W.H.O. (1990). Evaluasi Program Kesehatan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Depkes RI.
- Wijono D., (1999)., Manajemen Kepemimpinan dan Organisasi Kesehatan., UNAIR., Surabaya.
- Rohayatin, Titin (2021) Birokrasi Pemerintahan. CV Budi Utama: Yogyakarta.
- R Ramadhanti (2018) Politik Dan Birokrasi Pemerintahan. Jurnal Trias Politika, Vol 2. No.1 : 96 - 104 April 2018 e-ISSN: 2597-7423 p-ISSN: 2597-7431